

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan fokus penelitian tentang Manajemen pendidikan inklusif pada SMA/SMK Negeri di Kabupaten Banjar (Studi Multi Situs SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura), maka ada beberapa temuan berdasarkan subfokus-subfokus penelian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Dalam perencanaan kurikulum pertama kali yang dilakukan oleh sekolah adalah mensosialisasikan kurikulum adaptif melalui kegiatan bimbingan teknis, *workshop*, atau *In House Training*. Namun di dalam perencanaan kurikulum yang tertuang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dua sekolah yang diteliti belum memasukan kurikulum adaktif dan ada satu sekolah yang menggunakan model modifikasi pada indikator pencapaian keberhasilan.

Pengorganisasian kurikulum melibatkan tim pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran dan guru BK. Ketiga buah sekolah memiliki tim pengembang kurikulum dan memiliki uraian tugas masing-masing. Di dalam proses pembelajaran terkait dengan proses pengakomodasian kebutuhan peserta didik masing-masing sekolah memiliki perbedaan, ada guru yang belum siap dengan adaptasi kurikulum dan hanya sedikit yang memahami karakteristik peserta didik, ada guru yang hanya siap pada satu mata pelajaran saja sesuai dengan satu klasifikasi keterbatasan peserta didik berkebutuhan khusus, dan ada sekolah

yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan beberapa klasifikasi yang ada di sekolah. Kemudian ada satu sekolah yang memberikan pembelajaran individual bagi peserta didik yang tidak mampu mengikuti pembelajaran reguler.

Pada tiga sekolah yang diteliti Sebagian guru saja yang dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Sedangkan penilaian dalam pembelajaran setting Pendidikan inklusif ketiga sekolah memperlakukan kriteria ketuntasan minimal (KKM), ada sekolah yang menyamakan KKM peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus, ada sekolah yang menentukan KKM bagi peserta didik berkebutuhan sama secara kuantitas tapi berbeda secara kualitas dengan peserta didik reguler, dan ada sekolah yang tidak menggunakan istilah KKM bagi peserta didik berkebutuhan khusus tetapi dengan istilah *baseline*.

Pengevaluasian kurikulum yang dilakukan oleh kepala sekolah menekankan pada supervisi guru dalam proses pembelajaran, pengevaluasian belum mengarah pada perencanaan pembinaan akademik dalam setting pendidikan inklusif. Ada perbedaan pada ketiga sekolah dalam pengawasan, ada kepala sekolah yang melakukan sendiri, ada yang banyak dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan ada yang melakukan sendiri tetapi belum dapat mempercayai antara cara guru mengajar saat disupervisi dan saat tidak disupervisi. Ketiga sekolah ini juga belum menunjukkan penyusunan program monitoring dan evaluasi yang mengakomodasi kegiatan pendidikan inklusif.

2. Pengelolaan Peserta Didik pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Perencanaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada tiga sekolah terdapat perbedaan, ada sekolah yang menyiapkan sosialisasi kepada masyarakat dalam menerima

peserta didik berkebutuhan khusus yang dibatasi pada keterbatasan tertentu saja, ada yang merencanakan menerima peserta didik berkebutuhan khusus semua keterbatasan, dan ada yang menerima semua keterbatasan dan juga peserta didik berkebutuhan khusus (tanpa keterbatasan) dalam kategori layanan khusus. Dalam penempatan peserta didik pada program jurusan masing-masing sekolah menggunakan tes dan ada menggunakan non tes.

Pengorganisasian pengelolaan peserta didik ketiga sekolah memiliki kesamaan, kepala sekolah lebih banyak memberikan tugas kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan beberapa guru sesuai dengan tugasnya masing-masing. Proses pengelolaan terkait dengan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas, ada yang menempatkan pada satu kelas satu orang, ada yang tidak berarturan mengumpul dalam beberapa kelas, dan ada yang tidak berpedoman pada penempatan karena menyesuaikan dengan program keahlian.

Penentuan klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus melalui identifikasi dan asesmen ada terdapat perbedaan pada tiga sekolah yaitu ada yang melakukan identifikasi dan asesmen pada saat penerimaan peserta didik dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, ada yang hanya pada saat penerimaan peserta didik dan ada yang saat penerimaan tetapi melibatkan orangtua dan data dari sekolah sebelumnya.

Pengevaluasian peserta didik ketiga sekolah ini lebih menekankan pada penerimaan peserta didik baru sedangkan evaluasi pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus hanya dilakukan satu sekolah yaitu kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik secara langsung tanpa menggunakan instrument khusus. Dan evaluasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus secara rutin dilakukan oleh dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan pada bagian pendidikan khusus.

3. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Perencanaan pendidik dan kependidikan terkait dengan perencanaan guru pembimbing khusus masih belum direncanakan oleh salah satu sekolah, sedangkan pengorganisasian pendidikan dan tenaga kependidikan khusus khususnya bagi guru pembimbing khusus terdapat perbedaan pada masing-masing sekolah, ada sekolah yang tidak memiliki uraian tugas pokok dan fungsi secara khusus karena guru pembimbing khusus berasal dari guru bimbingan konseling yang telah mengikuti bimbingan teknis Pendidikan inklusif, ada ada sekolah yang memiliki guru pembimbing khusus tetapi memiliki uraian tugas sebagai guru mata pelajaran dan ada sekolah yang memiliki guru pembimbing khusus yang memiliki tugas sesuai dengan kompetensinya.

Pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan pada tiga sekolah memiliki kesamaan yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai pendidikan inklusif melalui kegiatan sosialisasi, *workshop*, *in house training*, dengan mengundang pakar pendidikan inklusif sebagai nara sumber seperti dosen, ketua forum komunikasi pendidikan inklusif dan Widyaiswara PPPPTK PLB Bandung. Ada satu sekolah yang sudah jarang mengadakan *workshop* yang mengundang nara sumber dari luar tetapi secara rutin setiap ada rapat dinas disekolah memasukan materi pendidikan inklusif yang dipaparkan oleh kepala sekolah sendiri.

Evaluasi terhadap pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap tugas pokok guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseing bukan pada tugas pokok guru pembimbing khusus. Dan ketiga sekolah belum mengevaluasi sejauh mana tugas guru pembimbing khusus dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

4. Pengelolaan Sarana Prasarana pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Perencanaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat pada dua sekolah namun ada satu buah sekolah yang belum memiliki rencana sarana prasarana pendidikan inklusif. Dalam pelaksanaan sarana dan prasarana ketiga buah sekolah belum memiliki sarana prasarana yang bersifat aksesibel, dan ada satu sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda namun akses jalan di lingkungan sekolah kurang mendukung bagi pengguna kursi roda sehingga jika peserta didik berkebutuhan khusus tersebut harus melewati jalan yang sulit dilaluinya maka dibantu oleh teman-temannya.

Ada sekolah yang mendapatkan bantuan sarana prasarana dari pemerintah namun bantuan sarana tersebut tidak dapat digunakan oleh sekolah karena peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan alat tersebut tidak terdapat di sekolah itu. Pengevaluasian sarana dan prasarana pada tiga buah sekolah memiliki instrument kepengawasan tertentu namun instrumen itu berlaku untuk sarana prasarana yang bersifat umum di sekolah,

5. Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat berkaitan dengan pendidikan inklusif adalah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkecimpung dalam pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif, seperti pusat layanan disabilitas, sekolah luar biasa, forum komunikasi pendidikan inklusif yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, terutama sekali bagi sekolah adalah dengan dengan tenaga ahli seperti dokter, psikolog dan terapis, ketiga buah sekolah tempat penelitian membuat perencanaan bekerjasama dengan tenaga ahli, orang tua, komite sekolah, sekolah luar biasa, forum komunikasi pendidikan inklusif dan perguruan tinggi,

Pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat pada tiga buah sekolah adalah melaksanakan kerjasama dengan tenaga ahli dan memberikan layanan konsultasi dengan orangtua peserta didik berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling sekaligus sebagai koordinator Pendidikan inklusif, dan ada satu sekolah yang memberikan layanan konsultasi terhadap orang tua peserta didik dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Evaluasi hubungan sekolah dengan masyarakat pada tiga sekolah memiliki instrumen evaluasi tetapi tidak memiliki hasil evaluasi kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Temuan substantif penelitian adalah faktor kunci manajemen Pendidikan inklusif terletak pada aspek psikologis seorang pemimpin, aspek psikologis tersebut terdiri dari rasa empati, sikap positif, dan totalitas. Rasa empati, ikut merasakan apa yang dirasakan terhadap semua peserta didik terutama peserta didik yang memiliki keterbatasan yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Sikap positif terhadap semua komponen-komponen Pendidikan inklusif yang dilaksanakan sehingga dampak sikap positif tersebut berimbas kepada sumber daya manusia yang dikelola. Totalitas atau bekerja dengan sepenuh hati atau memberikan pelayanan kepada semua peserta didik terutama peserta didik berkebutuhan khusus dengan sebaik-baiknya.

B. Saran-saran

1. Kekurangpahaman kepala sekolah tentang pendidikan inklusif adalah faktor yang menentukan kurang maksimalnya implementasi pendidikan inklusif disuatu sekolah. Sehingga perlu adanya bimbingan teknis penguatan manajemen Pendidikan inklusif bagi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah ditungkat kabupaten sampai di tingkat Nasional.

2. Manajemen peserta didik merupakan manajemen yang urgen dalam pendidikan diperlukan totalitas dalam kepemimpinan kepala sekolah. Seyogyanya kepala sekolah memotivasi guru untuk menemukan kelebihan peserta didik berkebutuhan khusus, dan menempatkannya pada program jurusan yang sesuai dengan kemampuannya.
3. Titik sentral implementasi pelayanan pendidikan inklusif terletak di tangan guru atau pendidik. Pemahaman tentang peserta didik berkebutuhan khusus sangat diperlukan bagi guru, guru harus dapat memahami dan mengidentifikasi kemampuan yang berbeda-beda dari setiap peserta didik, hal inilah perlunya kepala sekolah mengelola pendidik secara one by one atau secara individual. Pengelolaan secara individual dilakukan agar dapat diketahui apakah guru “belum memahami atau tidak mau memahami”. Jika tidak mau memahami maka perlu ditanamkan rasa empati terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, tumbuhnya rasa empati akan melahirkan kepedulian terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Pengembangan kompetensi tentang pendidikan inklusif bagi guru harus terus-menerus dilakukan kepala sekolah dapat melalui rapat dinas, atau dalam kegiatan khusus seperti workshop, seminar, atau *in house training*. Kegiatan tersebut dalam rangka membangun komitmen, konsistensi, pemahaman yang merata kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan indeks inklusif.
4. Pengelolaan sarana prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya memperhatikan sarana prasarana bagi kepentingan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, walaupun sarana prasarana sekolah secara

umum sudah terpenuhi, namun kepala sekolah perlu memberikan perhatian agar terpenuhi sarana prasarana pendidikan inklusif melalui perencanaan, pelaksanaan sarana prasarana kemudian melakukan evaluasi keterlaksanaan sarana prasarana tersebut. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi memang bukan menjadikan sekolah itu tidak inklusif tetapi berpengaruh pada indeks inklusif. Aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus disekolah sangat dibutuhkan sehingga jika terdapat peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik atau motorik

5. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sangat diperlukan karena sekolah perlu mengetahui dan memahami prosedur penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, dan berbagai bentuk penanganan dan pembelajaran oleh karena itu sekolah perlu menjalin kerja sama yang baik terutama kepada pusat sumber seperti Sekolah Luar Biasa, dan unit pelayanan pendidikan khusus atau forum komunikasi pendidikan inklusif yang ada di daerah. Hubungan sekolah dengan masyarakat akan terjalin dengan baik tidak terlepas dari usaha kepala sekolah dalam menyusun perencanaan dan melaksanakannya yang dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat.
6. Mengevaluasi keterlaksanaan atas implementasi kurikulum pendidikan inklusif harus dibedakan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sejauh mana keterlaksanaan penyelenggaraan kurikulum pendidikan inklusif atau sistem penyelenggaraan kurikulum inklusif sekolah yang bersangkutan. Demikian

pula pada aspek peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat. Setiap aspek yang akan dievaluasi harus menggunakan instrumen dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur evaluasi, implementasi evaluasi yang benar perlu selalu diperhatikan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah sehingga diketahui sisi kelemahan dan kekuatan sebuah program yang telah dilaksanakan.